

DAFTAR ISI

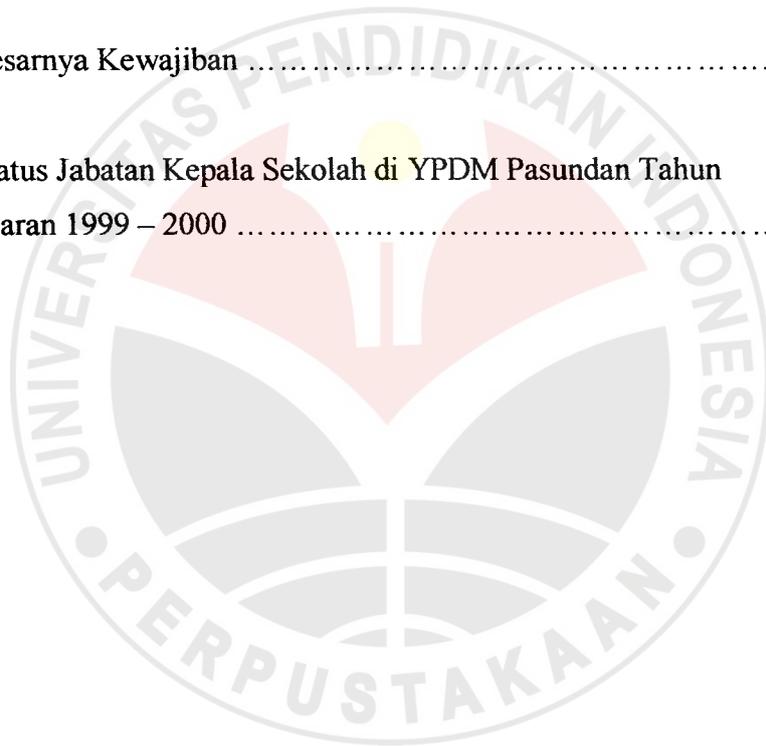
Halaman

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Angapan Dasar	12
F. Kerangka Berpikir	13
G. Lokasi Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kebijakan Pendidikan	
1. Kebijakan Pendidikan dan Administrasi Pendidikan	19
2. Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik	23
3. Implementasi Kebijakan	27
B. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional	
1. Hakekat Peraturan Perundang-undangan	33
2. Pengertian Masyarakat dan Peranserta Masyarakat	36
3. Pengertian Badan yang Bukan Bagian dari Pemerintah	43
4. Yayasan sebagai Penyelenggara Sekolah Swasta	46
C. Model dan Bentuk Kebijakan	48
D. Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan	49

		xiii
	E. Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan <u>Bidang Pendidikan</u>	51
	F. Kajian Teori Terdahulu	54
	G. Kesimpulan Hasil Studi Teoritis	56
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian	58
	B. Sumber Data dan Lokasi Penelitian	62
	C. Teknik Pengumpulan Data	62
	D. Tahap Pelaksanaan Penelitian	65
	E. Prosedur Analisis Data	70
	F. Signifikansi Hasil Penelitian	72
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA	
	A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional di YPDM Pasundan	75
	B. Model dan Bentuk Kebijakan YPDM Pasundan serta Kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat terhadap Sekolah Swasta	96
	C. Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992	
	1. Status Hukum YPDM Pasundan	105
	2. Landasan Hukum YPDM Pasundan	106
	3. Produk Hukum YPDM Pasundan	108
	4. Prosedur Hukum YPDM Pasundan	110
	D. Relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 dalam Era Otonomi Daerah	112
BAB V	KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	
	A. Kesimpulan	124
	B. Implikasi	131
	C. Rekomendasi	133
	DAFTAR PUSTAKA	139
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Nomor 1 : Data Sekolah Swasta di Propinsi Jawa Barat Tahun Ajaran 1995/1996 s.d. 1999/2000	4
Nomor 2 : Jumlah Sekolah dan Siswa Berdasarkan Jenjang yang dibina Oleh YPDM Pasundan Tahun Ajaran 1995/1996 s.d 1999/2000	7
Nomor 3 : Besarnya Kewajiban	93
Nomor 4 : Status Jabatan Kepala Sekolah di YPDM Pasundan Tahun Ajaran 1999 – 2000	93



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Nomor 1 : Kerangka Berpikir.....	16
Nomor 2 : Prosedur Penelitian	17
Nomor 3 : Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan	21
Nomor 4 : Posisi Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik	23
Nomor 5 : Model Proses Implementasi Kebijakan	30
Nomor 6 : Proses Kebijakan Sebagai Hierarki	31
Nomor 7 : Four Kind of Participation	41
Nomor 8 : Fenomena Peranserta	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Nomor 1 : Pedoman Wawancara
- Nomor 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
- Nomor 3 : Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
- Nomor 4 : Contoh Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah Swasta
- Nomor 5 : Struktur Organisasi YPDM Pasundan
- Nomor 6 : Akta Notaris Dede, SH Nomor 2 Tanggal 13 Desember 2000 tentang Perubahan Akta Notaris YPDM Pasundan
- Nomor 7 : Contoh Surat Keputusan yang dibuat oleh YPDM Pasundan
- Nomor 8 : Surat Keterangan Tanda Bukti Penerimaan Pendaftaran Organisasi dari Direktorat Sospol Pemda Tk. I Jawa Barat
- Nomor 9 : Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN